

**KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO DALAM
PENGADAAN LAHAN PEMBANGUNAN BANDARA NEW
YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT**

***KULON PROGO REGIONAL GOVERNMENT POLICY IN LAND PROCUREMENT
CONSTRUCTION OF NEW YOGYAKARTA INTERNATIONAL AIRPORT***

Oleh : Youris Setyo dan Drs. Argo Pambudi, M.Si., Fakultas Ilmu Sosial UNY,
yourissetyo96@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengadaan lahan pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport* serta mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi tersebut. Hasil penelitian ini disusun sebagai bahan evaluasi untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengenai kebijakan pengadaan lahan pembangunan bandara di Kulon Progo. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport sudah berjalan optimal. Hal tersebut dilihat dari aspek : 1) Komunikasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembangunan Bandara NYIA berhasil menyadarkan masyarakat terdampak pembangunan bandara, 2) Sumber Daya telah tercukupi dalam pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA, 3) Disposisi pelaksana kebijakan pengadaan lahan menunjukkan sikap positif dan tanggung jawab terhadap tugas yang dikerjakan, dan 4) Struktur Birokrasi pada pelaksanaan pengadaan lahan sudah memiliki pembagian wewenang dalam implementasi pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA. Terdapat dua faktor penghambat yaitu : 1) Penolakan dari warga yang tanahnya akan dipakai untuk pembangunan bandara NYIA, 2) Proses sertifikasi tanah milik warga belum bisa dilakukan karena berkas belum lengkap.

Kata kunci : Implementasi Kebijakan, Pengadaan Lahan, Bandara *New Yogyakarta International Airport*

Abstract

This study aims to determine the implementation of Kulon Progo Regional Government Policy in land procurement construction of New Yogyakarta International Airport and describe the inhibited factors of its implementation. The results of this study were prepared as an evaluation material for Kulon Progo Regional Government Policy In Land Procurement Construction Of New Yogyakarta International Airport. The research design used was descriptive with qualitative approach. The results of this study indicated that the Policy Implementation of Kulon Progo Regional Government Construction Of New Yogyakarta International has been an optimal progress. This is seen from the aspect : 1) Communication carried out by Team Construction of NYIA Airport was successfully carried out to the public, 2) The available resources for the land procurement construction of NYIA Airport are sufficient, 3) The disposition of implementing land procurement policies show a positive attitude, and 4) Bureaucratic structure in the implementation already has division of authority. There are inhibiting factors that arise include : 1) The rejection from the local community for the construction of NYIA Airport, 2) Unfinished land certifications progress of the local people due to incomplete necessary document.

Keyword : Policy Implementation, Land Procurement, New Yogyakarta International Airport

PENDAHULUAN

Keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari proses implementasinya. Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn dalam Budi Winarno (2007:144) adalah pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Salah satu kebijakan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Jokowi adalah kebijakan pembangunan infrastruktur. Kebijakan pembangunan infrastruktur yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu pembangunan bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) yang dibangun di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pembangunan Bandara NYIA digunakan untuk menggantikan Bandara Adisucipto yang sudah tidak mampu menampung lonjakan penumpang yang terus bertambah setiap tahun karena Yogyakarta merupakan kota populer tujuan wisata di Indonesia. Alasan perlunya pembangunan bandara NYIA disampaikan oleh Agus Pandu Purnama, selaku General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Yogyakarta sebagai berikut : 1) Jumlah penumpang di bandara Adisucipto sudah

melebihi kapasitas penumpang, kapasitas bandara Adisucipto dirancang untuk menampung 1,2 – 1,5 juta penumpang per tahun, sedangkan di tahun 2017 sudah mencapai 7,8 juta penumpang. Hal tersebut berdampak terhadap kenyamanan yang dirasakan oleh pengguna jasa bandara Adisucipto. 2) Panjang landasan pacu (runway) bandara Adisucipto hanya 2200 meter, sehingga dirasa tidak mampu menampung pesawat berbadan lebar, apron bandara Adisucipto hanya bisa menampung 11 pesawat. 3) Bandara Adisucipto merupakan bandara milik TNI AU yang dirancang untuk penerbangan militer bukan untuk penerbangan sipil. 4) Pengembangan area bandara Adisucipto tidak bisa dilakukan karena terhambat keterbatasan lahan. Bandara NYIA dibangun untuk dapat menampung 15 juta penumpang per-tahun serta 300 penerbangan perharinya, pembangunan bandara NYIA juga untuk mendukung sektor pariwisata kota Yogyakarta yang menjadi tujuan utama pariwisata nomor 2 di Indonesia.

Kebijakan pembangunan bandara NYIA mempunyai kendala terkait lahan yang akan digunakan untuk pembangunan bandara baru tersebut. Lahan yang akan digunakan bukan lahan milik Negara, tetapi lahan itu berupa Pakualam Ground dan lahan milik warga. Total 6.802 hektare tanah yang akan dibangun sebagai bandara

berkapasitas 10.000 penumpang setiap tahun. Tanah yang digunakan untuk pembangunan bandara seluas 60% adalah tanah milik warga, sedangkan 40% adalah tanah milik pakualam. Sekitar 12,4 hektar lahan pembangunan bandara NYIA merupakan lahan milik pemukiman warga, sehingga Pemerintah dan PT. Angkasa Pura I memerlukan adanya relokasi lahan pemukiman bagi warga setempat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Tim Koordinasi Pembangunan Bandara NYIA menunjukkan data tanah yang akan digunakan untuk pembangunan bandara NYIA seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Data tanah bandara NYIA

Tanah Milik	Desa
Perorangan	Sindutan, Jangkar, Kebonrejo, Palihan, Glagah
Pemerintah Desa	Sama
Pemkab Kulon Progo	Sama
Pemda DIY	Sama
Tanah diluar IPL	Sama
Penggarap PAG	Sama

Sumber : Tim Koordinasi pembangunan bandara NYIA.

Tahap awal pelaksanaan pembebasan lahan bandara NYIA sebagian besar warga menolak direlokasi karena mereka takut kehilangan pekerjaan sebagai petani. Bahkan ditahun 2015 warga penolak bandara melakukan gugatan ke PTUN yang membuat pembangunan bandara harus dihentikan. Namun Gubernur DIY melakukan kasasi ke MA dan setelah permohonan kasasi dikabulkan oleh MA maka pembangunan bandara NYIA bisa kembali dilanjutkan.

Pembebasan lahan mulai dilanjutkan pada tahun 2016, beberapa penduduk dapat menerima dan memberikan reaksi pro aktif terhadap kebijakan yang diberikan oleh pemerintah terkait dengan ganti rugi biaya pengosongan lahan bagi penduduk yang sebelumnya bertempat tinggal di Desa Glagah dan sekitarnya. Masih ada 36 Kepala Keluarga yang merasa keberatan dan tidak setuju dengan adanya kesepakatan yang ditawarkan oleh pemerintah, mereka menolak untuk direlokasi dan menerima biaya penggantian lahan sehingga menghambat percepatan pembangunan bandara NYIA.

Oleh sebab itu, Pemda DIY dan Pemkab Kulon Progo tentu memiliki kebijakan yang dilakukan untuk pembebasan lahan warga masyarakat terdampak bandara NYIA di Desa Glagah, Palihan, Janten, Kebonrejo, dan Jangkar

Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo agar percepatan pembangunan bandara baru dapat berjalan dengan baik. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemkab Kulon Progo adalah membentuk Tim Koordinasi pembangunan bandara New Yogyakarta International Airport (NYIA).

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur menggunakan teori implementasi kebijakan. Adapun teori implementasi kebijakan Antara lain Van Metter dan Van Horn (1975), Edward III (1980), dan Grindle (1980). Dalam penelitian ini, mengukur keberhasilan Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA, menggunakan teori dari Edward III. Ada empat kelompok indikator yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni : 1) Komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi.

Teori ini dipilih karena indikator yang ada di teori ini sesuai untuk menganalisis Implementasi Pengadaan Lahan Pembangunan Bandara NYIA.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengimplementasikan kebijakan pengadaan lahan.

METODE PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan peneliti menggunakan penelitian deksriptif kualitatif adalah menjelaskan dan mendeskripsikan realita di lapangan secara empiris sehingga fenomena yang diteliti dapat dianalisis secara lebih mendalam, rinci, dan menjawab rumusan masalah terkait Implementasi Kebijakan Pengadaan Lahan Pembangunan Bandara NYIA.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo beralamatkan di Jalan Perwakilan No. 1 Wates. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan Februari 2019.

Subjek Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah Kasubag Tata Pemerintahan Umum Setda Kulon Progo, Kepala Sub Bidang Penataan Ruang Bappeda, Kasubsi Fasilitasi Pengadaan Tanah Kantah Kulon Progo, Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemerintahan Desa, Warga terdampak pembangunan bandara NYIA.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Selain peneliti sebagai instrumen utama juga menggunakan instrumen pendukung untuk mempermudah pengumpulan data seperti menggunakan alat bantu pedoman

dari foto, pedoman wawancara, pedoman observasi, catatan di lapangan, dan *voice recorder* terkait Kebijakan Pengadaan Lahan Pembangunan Bandara NYIA

Sumber dan Jenis Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2014 : 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian dan observasi terkait dengan Implementasi Pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi yang di dapat dari lokasi penelitian antara lain Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No 58/A/2016, Rumusan uraian target kinerja Tim Koordinasi, Data pengadaan tanah pembangunan bandara NYIA.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan pengamatan langsung terkait implementasi pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA Antara lain pengamatan terhadap stakeholder dan implementor, terutama anggota Tim Koordinasi pembangunan bandara NYIA. Observasi ini dilakukan berkali-kali dan dilakukan dengan pencatatan secara langsung.

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dalam wawancara ini selain panca indra peneliti juga menggunakan *voice recorder* yang telah disesuaikan agar tidak mengganggu jalannya proses wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang telah dipilih sebagai subjek penelitian. Peneliti memilih narasumber tersebut karena dengan pertimbangan bahwa narasumber tersebut merupakan orang yang memahami dan terlibat dalam implementasi pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA.

3. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan dokumentasi berupa data jumlah warga terdampak bandara, luas lahan pembangunan bandara, tugas Tim Koordinasi pembangunan bandara NYIA. Peneliti juga melakukan dokumentasi melalui telaah pustaka dari sumber literatur buku dan artikel jurnal serta skripsi. Selain itu peneliti juga menggunakan dokumentasi foto sebagai bukti observasi keadaan di lapangan yang diperoleh dari Tim Koordinasi pembangunan bandara NYIA.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2009 : 337-338) yang terdiri atas empat tahap yaitu : 1) Pengumpulan Data, 2) Reduksi Data, 3) Penyajian Data, dan 4) Penarikan Kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melihat keberhasilan implementasi kebijakan Pemkab Kulon Progo dalam pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA menurut Edward III, ada empat indikator utama yang mempengaruhi, yakni Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi menjadi salah satu faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA. Komunikasi mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi.

a. Dimensi Transmisi (penyampaian informasi)

Informasi mengenai kebijakan pengadaan lahan perlu disampaikan kepada berbagai

pihak, selain kepada kelompok sasaran (masyarakat) juga kepada para pelaksana kebijakan (implementor).

1) Penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan

Proses penyampaian informasi kebijakan pengadaan lahan dilaksanakan melalui rapat seluruh instansi yang tergabung dalam Tim Koordinasi pembangunan bandara NYIA. Anggota Tim Koordinasi saling berkoordinasi sesuai tugas mereka masing-masing agar dalam melaksanakan tugas dapat terkoordinir dengan baik.

2) Penyampaian informasi kepada masyarakat (kelompok sasaran)

Penyampaian informasi mengenai kebijakan pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA kepada masyarakat menjadi hal yang paling penting dan utama. Hal ini karena proses awal dalam pelaksanaan pengadaan lahan adalah proses penyampaian informasi dengan sosialisasi kepada masyarakat khususnya yang terdampak pembebasan lahan.

Pada awal sosialisasi di tahun 2015 semua warga yang tanahnya akan dibebaskan menolak rencana pemerintah untuk

membangun bandara NYIA. Hal inilah yang menghambat pelaksanaan pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA hingga molor sampai tahun 2017. Namun penolakan dari warga berkurang setelah MA mengabdikan Kasasi Gubernur DIY yang mengizinkan pembangunan bandara NYIA tetap dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan Bapak Wakijo :

“Setelah Pembangunan bandara NYIA diijinkan oleh MA, beberapa warga mulai mau diajak komunikasi oleh Tim Pengadaan Lahan Mas. Mereka lama-lama sepakat dengan ganti rugi dan jaminan mendapatkan pekerjaan di bandara baru nanti. Melihat ada warga yang mau diajak komunikasi, warga yang lain akhirnya menerima ajakan komunikasi. Warga jadi mau diajak komunikasi karena ganti rugi memang dilakukan Mas.”

Sumber : wawancara

Beberapa warga di Desa Glagah akhirnya mau menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi setelah mulai banyak warga menerima kesepakatan ganti rugi dari pemerintah. Warga yang lain akhirnya mulai membuka diri dengan sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi. Hal tersebut

dikarenakan pemerintah memberi ganti rugi dan lahan relokasi.

Berdasarkan penelitian Akhmad Sopanudin (2016) tentang Konflik Lahan Pertanian dalam Pembangunan Bandara NYIA menunjukkan bahwa indikator Komunikasi menunjukkan sempat mengalami hambatan yaitu penolakan dari warga terdampak bandara. Penelitian tersebut menjelaskan adanya konflik sosial yang membagi kelompok pro dan kontra bandara.

b. Dimensi Kejelasan

Kejelasan penyampaian informasi mengenai kebijakan pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA sudah baik. Kejelasan informasi dirasakan oleh para pelaksana kebijakan maupun masyarakat terdampak. Para pelaksana kebijakan mampu memahami tugas yang diberikan sehingga bisa menyampaikan informasi yang jelas kepada masyarakat terdampak bandara melalui sosialisasi.

Sebelum dilakukan sosialisasi oleh Tim Koordinasi, warga masih berprasangka buruk dan menolak pengadaan lahan pembangunan bandara. Namun

setelah dilakukan sosialisasi, warga mulai paham dan menerima kebijakan dari pemerintah karena sosialisasi sudah jelas terkait ganti rugi.

c. Dimensi Konsistensi

Informasi yang disampaikan mengenai kebijakan pengadaan lahan dalam pembangunan bandara NYIA sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang ada. Konsistensi selalu menjadi pedoman agar pada pelaksanaan pengadaan lahan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam menyampaikan informasi harus mengacu pada peraturan yang sudah ada.

Penyampaian informasi kebijakan pengadaan lahan bandara NYIA termasuk yang mengutamakan konsistensi. Hal ini diungkapkan oleh Kasubag Tata Pemerintahan Umum Setda Kulon Progo, Ibu Lisna Prasetyorini :

“apa yang disampaikan oleh tim harus konsisten dari peraturan yang berlaku. Tim tidak akan memberikan informasi yang melebih-lebihkan bahkan hoax”

Sumber : Wawancara

Apa yang disampaikan dalam proses komunikasi terutama dalam penyampaian kebijakan

pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA harus konsisten dan jelas agar para pelaksana kebijakan maupun kelompok sasaran tidak merasa bingung. Apa yang menjadi pedoman harus disampaikan dengan benar sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemkab Kulon Progo dalam pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA yaitu : sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan.

a. Sumber daya manusia (pelaksana kebijakan)

Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA tergolong cukup memadai jika dilihat dari peran dan fungsi masing-masing, para pelaksana kebijakan ini mampu bekerja dengan baik sesuai tugas mereka masing-masing. Para pelaksana kebijakan dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No. 58/A/2016. Pembentukan para

pelaksana kebijakan dimaksudkan agar memperlancar proses pengadaan lahan. Para pelaksana kebijakan adalah Tim Koordinasi Pembangunan Bandara NYIA yang terdiri dari kelompok pengarah dan kelompok pelaksana. Kelompok pengarah terdiri dari 9 orang, sedangkan kelompok pelaksana terdiri 21 orang dari 3 instansi Bappeda, Dinas Pemerintah Desa, dan Kantah Kulon Progo.

Tabel 2. Kelompok pelaksana pengadaan lahan Tim Koordinasi pembangunan bandara NYIA

No	SKPD	Tugas
1	Bappeda	Melaksanakan rencana penyusunan tata ruang wilayah Kecamatan Temon dan sekitarnya
2	Dinas Pemerintahan Desa Kulon Progo	Melakukan inventarisasi tanah kas desa dalam bandara
3	Kantah Kulon Progo	Melaksanakan proses pendaftaran tanah yang dimohonkan pemerintah kabupaten dan desa akibat terdampak bandara.

Sumber : Sekda Kulon Progo, 2018

Tim Koordinasi bertugas untuk membantu proses pelaksanaan pengadaan lahan dari tahap awal yaitu sosialisasi hingga proses akhir yaitu pelepasan hak tanah.

b. Sumber daya anggaran

Biaya atau anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pembebasan lahan yaitu sebesar Rp. 10,8 triliun yang bersumber dari pinjaman bank, penerbitan obligasi, dan APBN. Pengalokasian dana itu sendiri Rp. 6,7 triliun untuk proses konstruksi dan Rp. 4,1 triliun untuk pengadaan lahan. Adapun anggaran pembangunan bandara NYIA lebih jelas dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Anggaran pembangunan bandara NYIA

No.	Anggaran	Jumlah
1	Konstruksi	6,7 triliun
2	Pengadaan Lahan	4,1 triliun
Jumlah		10,8 triliun

Sumber : Sekda Kulon Progo, 2018
Ketersediaan anggaran tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA. Pengalokasian dana tersebut juga sudah digunakan secara tepat,

dibuktikan pengadaan lahan berjalan sukses dan bandara NYIA berhasil dibangun.

c. Sumber daya peralatan

Sumber daya peralatan diperlukan untuk mendukung operasional pelaksanaan kebijakan pengadaan lahan bandara NYIA. Peralatan-peralatan tersebut Antara lain peralatan untuk mengukur luas tanah/bidang yang akan diambil alih haknya. Peralatan tersebut bernama CORS (alat pengukur digital) yang digunakan oleh Kantor Pertanahan Kulon Progo. Kendala peralatan yang digunakan untuk mengukur luas tanah tersebut terbatas sedangkan bidang yang akan diukur luasnya mencapai 5,851,825 m² yang tersebar di 5 Desa di Kecamatan Temon Kabupaten Kulon Progo.

d. Sumber daya kewenangan

Sumber daya lain yang cukup penting dalam mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA adalah sumber daya kewenangan, dimana para pelaku kebijakan diberi kewenangan khusus untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan perannya masing-masing.

Kewenangan yang diberikan sesuai dengan keputusan dari atasan.

Tim Koordinasi pembangunan bandara NYIA diberi kewenangan khusus oleh Bupati untuk melaksanakan segala proses pelaksanaan pengadaan lahan untuk membantu pembangunan bandara NYIA. Bupati memberi surat keputusan secara langsung kepada Tim Koordinasi yang menyangkut susunan kepanitiaan beserta tugas masing-masing.

3. Disposisi (sikap pelaksana)

Sikap para pelaksana kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA menunjukkan sikap positif dan tanggung jawab. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kasubag Tata Pemerintahan Umum Setda Kulon Progo :

“tim sudah bekerja secara maksimal dan mendukung sepenuhnya pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA. Pembangunan bandara NYIA nantinya akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat, jadi tim harus mendukung sepenuhnya.”
(Wawancara)

Adanya tanggapan positif dari berbagai pihak maka akan memperlancar proses jalannya kebijakan tersebut dan pada akhirnya pembangunan bandara

terwujud setelah proses pengadaan lahan terlaksana dengan baik.

Selain sikap positif, indikator disposisi dalam implementasi kebijakan pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA yaitu terdiri dari pengangkatan birokrat dan intensif.

a. Pengangkatan birokrat

Pengangkatan birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA dilakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing untuk melaksanakan tugas. Pengangkatan birokrat khususnya untuk Tim Koordinasi pembangunan bandara NYIA yaitu Dinas/Instansi-Instansi Kabupaten Kulon Progo yang terkait dengan pelaksanaan pengadaan lahan. Pengangkatan birokrat dilakukan langsung oleh Bupati Kulon Progo melalui Surat Keputusan resmi. Panitia yang dibentuk sudah disiapkan untuk melaksanakan tugas masing-masing sesuai bidang agar tidak terjadi kesulitan yang berarti karena mereka sudah memahami betul bidang apa yang mereka kerjakan.

b. Intensif

Terkait dengan pemberian intensif kepada Tim Koordinasi terdapat anggaran khusus dari APBD Kabupaten Kulon Progo yaitu 0,4% dari total pembayaran yang dilakukan dalam pembebasan lahan. Pemberian intensif kepada Tim Koordinasi ini dilakukan guna memperlancar kinerja mereka dalam pengadaan lahan.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi akan memudahkan dan penyesuaian tindakan dari para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan bidangnya. Struktur birokrasi pada pelaksanaan kebijakan pengadaan lahan ini mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang serta hubungan antar unit-unit organisasi/instansi. Setiap tim yang bekerja dalam pengadaan lahan ini memiliki struktur organisasi masing-masing seperti yang dibahas pada pembentukan Tim Koordinasi.

Struktur pembagian tugas juga disesuaikan dengan peran

instansi masing-masing. Untuk Tim Koordinasi yang didalam struktur organisasinya terdapat dinas/instansi yang memiliki tugas sesuai bidangnya, yaitu Bappeda bertugas untuk melaksanakan rencana penyusunan tata ruang kawasan strategis bandara NYIA. Dinas Pemerintahan Desa bertugas melakukan inventarisasi tanah kas desa didalam bandara dan mengajukan permohonan ijin Gubernur untuk pelepasan hak tanah kas desa. Sedangkan Kantor Pertanahan bertugas membantu BPN kanwil DIY dalam teknis pengukuran luas tanah dan mendata subyek hak kepemilikan tanah, serta melaksanakan pendaftaran terhadap tanah yang dimohonkan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dan Pemerintah Desa akibat terdampak bandara. Pembagian-pembagian wewenang tersebut bertujuan untuk memfokuskan kinerja para birokrat agar dapat menjalankan perannya masing-masing.

Pada indikator Komunikasi sudah menunjukkan keberhasilan implementasi, yaitu : 1) Penyampaian informasi kepada para pelaksana dan masyarakat berhasil dilakukan, 2) Kejelasan informasi yang

diberikan kepada sasaran kebijakan sudah baik , 3) informasi yang disampaikan mengenai kebijakan pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA sudah sesuai dengan peraturan dan pedoman yang berlaku. Hal tersebut juga didukung dalam teori yang dikemukakan oleh Van Horn dan Van Metter (dalam Widodo 2007) bahwa agar kebijakan publik bisa dilaksanakan dengan efektif, apa yang menjadi standar tujuan harus dipahami oleh para individu (implementor) yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan kebijakan, karena itu standar dan tujuan harus dikomunikasikan kepada para pelaksana.

Pada indikator Sumber daya juga sudah menunjukkan keberhasilan implementasi, yaitu : 1) Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA sudah terukupi, terdiri dari anggota Tim Koordinasi dibantu Tim Pelaksana Kecamatan, 2) Sumber daya anggaran dalam pelaksanaan pengadaan lahan sebesar 10,8 triliun, 3) Sumber daya peralatan untuk pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA menggunakan teknologi canggih yaitu CORS (alat pengukur digital) sehingga cepat dalam pengukuran lahan 4) Sumber daya kewenangan Tim Koordinasi pembangunan bandara NYIA sudah memiliki payung hukum resmi melalui

Surat Keputusan Bupati Kulon Progo No 58/A/2016.

Sedangkan indikator Disposisi dan Struktur Birokrasi sudah menunjukkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Dalam indikator Disposisi sikap pelaksana kebijakan sudah menunjukkan sikap yang baik dan tanggung jawab kepada sasaran kebijakan yaitu warga terdampak bandara NYIA. Hal tersebut dibuktikan dengan warga mau menerima sosialisasi dari Tim Koordinasi dalam membahas masalah ganti rugi dan pembebasan lahan. Indikator Struktur Birokrasi juga sudah menunjukkan bahwa Tim Koordinasi sudah memiliki struktur organisasi dan pembagian tugas masing-masing, sehingga setiap anggota Tim Koordinasi dapat menjalankan tugas masing-masing yang sudah diberikan untuk pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA sudah berhasil karena dari empat indikator keberhasilan implementasi yang dikemukakan Edward III, semuanya berhasil terlaksana dengan baik.

Hambatan dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Kulon Progo dalam Pengadaan Lahan Pembangunan Bandara NYIA

Adapun faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA yaitu:

- a. Penolakan dari warga terdampak pembangunan bandara NYIA
- b. Berkas warga tidak lengkap dalam proses sertifikasi tanah pengganti
- c. Proses penggantian tanah kas Desa yang dipakai untuk pembangunan bandara NYIA masih dalam proses ijin Gubernur DIY

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian data dan pembahasan yang telah diuraikan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA sudah berhasil. Sesuai dengan teori implementasi kebijakan Edward III, keberhasilan implementasi dianalisis dari indikator Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Berikut faktor-faktor keberhasilan implementasi berdasarkan indikator Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi :

a. Komunikasi

Informasi yang terjalin Antara pelaksana kebijakan (Tim Koordinasi) dengan kelompok sasaran (masyarakat pemilik lahan) terjalin dengan baik melalui rapat maupun sosialisasi, selain itu informasi yang disampaikan juga cukup jelas dan konsisten tentang apa yang disampaikan dengan pelaksanaannya.

b. Sumber daya

Sumber daya manusia dalam pengadaan lahan bandara NYIA tergolong sudah mencukupi, para pelaksana kebijakan dibentuk menjadi Tim Koordinasi pembangunan bandara NYIA yang terdiri dari kelompok pengarah dan kelompok pelaksana. Untuk sumber daya anggaran memiliki anggaran Rp. 10,8 triliun, pengalokasian dana Rp. 6,7 triliun untuk proses kontruksi dan Rp. 4,1 triliun untuk pengadaan tanah. Sumber daya peralatan untuk pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA sudah cukup memadai dan menggunakan teknologi canggih yaitu CORS (alat pengukur digital) sehingga cepat dalam melakukan pengukuran tanah untuk pembangunan bandara NYIA.

c. Disposisi

Sikap para pelaksana dalam pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA menunjukkan sikap

baik dan tanggung jawab.

Pengangkatan birokrat dalam pelaksanaan pengadaan lahan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing untuk melaksanakan tugas.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi pada pelaksanaan pengadaan lahan ini mencakup aspek seperti struktur organisasi, pembagian wewenang serta hubungan antar unit-unit organisasi. Setiap tim yang bekerja dalam pengadaan lahan memiliki struktur organisasi masing-masing. Pembagian wewenang bertujuan untuk memfokuskan kinerja para birokrat agar dapat bekerja sesuai perannya masing-masing.

Ada beberapa kendala maupun hambatan yang terjadi dalam Implementasi Kebijakan Pemkab Kulon Progo dalam pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA sehingga sempat membuat terhambat dalam proses implementasinya. Namun hambatan tersebut dapat diatasi oleh Tim Koordinasi pengadaan lahan pembangunan bandara NYIA. Hambatan tersebut antara lain penolakan warga yang tanahnya akan dipakai untuk pembangunan bandara NYIA. Hambatan juga terjadi saat proses sertifikasi tanah pengganti milik warga terdampak bandara. Banyak berkas warga yang tidak lengkap sehingga proses sertifikasi belum bisa dilakukan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan yang berkaitan dengan kebijakan pengadaan khususnya dalam pembangunan bandara NYIA sebagai berikut.

1. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus cepat menyelesaikan proses relokasi dan pemberdayaan masyarakat terdampak pembangunan bandara NYIA
2. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus segera mengganti tanah kas Desa yang dipakai untuk pembangunan bandara NYIA.

DAFTAR PUSTAKA

Budi Winarno. (2012). *Kebijakan Publik :Teori, Proses, dan Studi Kasus.* Yogyakarta : CAPS.

Dunn William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan (Terjemahan).* Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Dwi Purwanto. (2008). *Kebijakan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Pembangunan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Kabupaten Wonogiri, Laporan Penelitian.* Universitas Negeri Sebelas Maret. Solo.

Joko Widodo. (2007). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Jakarta : Ghalis Indonesia.

Moleong, Lexy J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Oloan Sitorus dan Dayat Limbong. (2004). *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Untuk Kepentingan Umum.* Yogyakarta : Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.

Supriadi. (2008). *Hukum Agraria.* Jakarta : Sinar Baru Algesindo

Akhmad Sopanudin. (2016). *Konflik Lahan Pertanian Dalam Pembangunan Bandara International di Kulon Progo.* *Jurnal Penelitian Sosiologi.* Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012. *Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum*

Surat Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 58/A/2016. *Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembangunan Bandara Baru Tahun Anggaran 2016.*